

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

INSPEKTORAT JENDERAL

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X-6 No. 8, Kuningan, Jakarta Selatan 12940, P.O. Box 3489, Telepon/Faksimili 021-5252975 Laman: http://www.itjen.kemenkumham.go.id, Email: itjen@kemenkumham.go.id

Nomor : ITJ.2.PW.02.01-149 29 Oktober 2021

Lampiran : -

Perihal : Permintaan Data dan Dokumen Pendukung

Kepada Yth.

Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Di -

Jakarta

Berdasarkan Surat Perintah Inspektur Jenderal Nomor: ITJ.KP.04.01.1-123 tanggal 28 Oktober 2021, Tim Inspektorat Jenderal akan melaksanakan **Evaluasi Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Tahun 2021** pada Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM. Sehubungan dengan hal tersebut kami sampaikan permintaan data dan dokumen pendukung evaluasi berikut:

No.	Dokumen	Ada/Tidak	Keterangan
1	Rekomendasi terkait perubahan SOP pelaksanaan kode etik dalam hal Pelaksanaan Tugas dan Fungsi, Pengelolaan Keuangan, pengelolaan aset dan kepatuhan atas peraturan perundang-undangan		
2	Kode etik telah dimuat dalam Dokumen Manajemen Risiko sebagai bagian pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam hal Pengelolaan Keuangan, pengelolaan aset dan kepatuhan atas peraturan perundang-undangan		
3	Dokumentasi Reward and Punishment dalam hal Pelaksanaan Tugas dan Fungsi, Pengelolaan Keuangan, pengelolaan aset dan kepatuhan atas peraturan perundang-undangan		
4	Banner/Spanduk terkait Kode Etik dalam hal Pelaksanaan Tugas dan Fungsi, Pengelolaan Keuangan, pengelolaan aset dan kepatuhan atas peraturan perundang-undangan		
5	PP 53 Tahun 2010		
6	Permenkumham 23 Tahun 2020 Tentang Penerapan Hukuman Disiplin		
7	Permenkumham No M.HH-16.KP.05.02 Tahun 2011 tentan Kode Etik PAS		
8	Permenkumham No M.HH-02 tentang Kode etik Imigrasi		
9	SOP prosedur pelaksanaan kode etik dalam hal Pelaksanaan Tugas dan Fungsi, Pengelolaan Keuangan, pengelolaan aset dan kepatuhan atas peraturan perundang-undangan		
10	Laporan Evaluasi terkait perubahan SOP pelaksanaan kode etik dalam hal Pelaksanaan Tugas dan Fungsi, Pengelolaan Keuangan, pengelolaan aset dan kepatuhan atas peraturan perundang-undangan		

11	Standar jabatan telah dimuat dalam Dokumen Manajemen Risiko dalam hal Pelaksanaan Tugas dan Fungsi, Pengelolaan Keuangan, pengelolaan aset dan kepatuhan atas peraturan perundang-undangan	
12	LAKIP Satuan Kerja	
13	Peraturan terkait standar kompetensi manajerial dan sosio kultural dalam hal Pelaksanaan Tugas dan Fungsi, Pengelolaan Keuangan, pengelolaan aset dan kepatuhan atas peraturan perundang-undangan	
14	SOP terkait promosi dan mutasi yang mengimplementasikan adanya standar jabatan dalam hal Pelaksanaan Tugas dan Fungsi, Pengelolaan Keuangan, pengelolaan aset dan kepatuhan atas peraturan perundang-undangan	
15	Laporan TL atas hasil evaluasi	
16	Dokumen/UANG (Undangan, Absensi, Notula dan Gambar) pertemuan rutin membahas kinerja contoh coffe morning dll	
17	Dokumen/UANG (Undangan, Absensi, Notula dan Gambar) penyusunan Renstra dan PK yang melibatkan pimpinan	
18	SOP terkait pencapaian kinerja dalam hal Pelaksanaan Tugas dan Fungsi, Pengelolaan Keuangan, pengelolaan aset dan kepatuhan atas peraturan perundang-undangan	
19	Sertifikat Pegawai yang telah mengikuti diklat MR dsb.	
20	Dokumen RKAKL yg memuat anggaran untuk Implementasi MR seperti rapat terkait MR, Identifikasi Risiko, analisis risiko dll	
21	SOP terkait Tugas dan Fungsi dalam hal Pengelolaan Keuangan, pengelolaan aset dan kepatuhan atas peraturan perundang-undangan	
22	Dokumen Peta Bisnis Proses	
23	Kepmenkumham M.HH-85.KP.04.01 Tahun 2015 tentang Pemberian Kuasa Untuk Atas Nama Menteri Hukum dan HAM	
24	SOP terkait pendelegasian wewenang dalam hal Pelaksanaan Tugas dan Fungsi, Pengelolaan Keuangan, pengelolaan aset dan kepatuhan atas peraturan perundang-undangan	
25	SOP Penerbitan Surat Perintah tentang Penunjukan PLT Jabatan Pimti Madya pada Unit Utama dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Kanwil	
26	Laporan monitoring dan evaluasi pengelolaan SIMPEG secara berkala untuk pegawai yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan, pengelolaan aset dan kepatuhan atas peraturan perundang-undangan	
27	Perka BKN	
28	Permenkumham Nomor 8 Tahun 2021 tentang Manajemen karir Kemenkumham	
29	SOP terkait rekrutmen pegawai s.d pensiun	
30	SOP pengelolaan SIMPEG Pegawai secara umum serta yang menangani Pengelolaan Keuangan dan pengelolaan aset	

31	SOP terkait proses kerjasama dengan instansi luar dalam hal Pelaksanaan Tugas dan Fungsi, Pengelolaan Keuangan, pengelolaan aset dan kepatuhan atas peraturan perundang-undangan	
32	Dokumen MR yang telah di perbahrui	
33	Dokumen MR	
34	Dokomen Target Kinerja dan Perjanjian Kinerja	
35	Laporan Reviu Kebijakan MR secara berkala	
36	Laporan Evaluasi MR	
37	Dokumen Proses Bisnis	
38	Dokumen Target Kinerja	
39	Dokumen Perjanjian Kinerja	
40	Dokumen RKAKL	
41	Dokumen Evaluasi MR	
42	Dampak tindak lanjut perbaikan dijadikan rekomendasi atas pelaksanaan Monev yang telah berjalan	
43	Adanya TL Perbaikan	
44	Dokumen pemantauan kinerja dalam hal Pelaksanaan Tugas dan Fungsi, Pengelolaan Keuangan, pengelolaan aset dan kepatuhan atas peraturan perundang-undangan	
45	Permenkumham ttg Tarja	
46	SOP atas reviu kinerja (monev)	
47	Laporan monitoring dan evaluasi pengelolaan SIMPEG secara berkala	
48	Laporan evaluasi yang mencakup rekomendasi perbaikan	
49	Dokumen analisa kebutuhan diklat	
50	Dokumen kebutuhan CPNS	
51	Dokumen analisa jabatan dan analisa beban kerja	
52	SOP terkait pembinaan SDM	
53	Laporan evaluasi yang mencakup rekomendasi perbaikan	
54	Dokumen TL	
55	Laporan pengelolaan aplikasi	
56	Daftar Aplikasi yang digunakan	
57	Permenkumham M.HH-04.IN.04.02 Tahun 2011 tentang tata cara pengelolaan dan pelayanan informasi publik	
58	Kepmenkumham Nomor M.HH-01.TI.06.03 Tahun 2020 tentang Penerapan Sistem Integrasi Satu Data (SADA)	
59	Kepmenkumham Nomor M.HH.01.TI.05.04 Tahun 2020 tentang Grand Design TI Kemenkumham 2020-2024	
60	SOP terkait pengelolaan Sistem Informasi	
61	SE KARO BMN terkait perencanaan pengadaan dan pengeloaan aset	
62	SOP Perencanaan dan Pengelolaan Aset	
63	Permenkumham/Kepmenkumham perbahan IKU atau Renstra	
64	Permenkumham tentang Target Kinerja	
65	SOP terkait penetapan dan reviu atas target kinerja	
66	Permenkumham nomor 30 Tahun 2018 tentang ORTA Kanwil	

67	SK Operator BMN, Operator SAIBA dll	
68	SOP terkait masing-masing fungsi pelaksana kegiatan	
69	Permenkumham nomor 30 Tahun 2018 tentang ORTA Kanwil	
70	SOP penggunaan aplikasi SIMPEG, SIMWAS, SDP, SIMKIM dan aplikasi lainnya	
71	SOP terkait kewenangan jabatan yang diatur dalam ORTA	
72	Permenkumham Nomor 4 tahun 2014 tentang permohonan badan hukum dan perubahan anggaran dasar	
73	SOP terkait monitoring dan evaluasi terkait pengendalian intern atas aplikasi SIMPEG, SIMWAS, SDP, SIMKIM dan lainnya	
74	SOP terkait pengelolaan pengaduan di unit kerja	
75	Sosialisasi telah dilakukan kepada seluruh pihak terkait	
76	Register risiko dan RTP dapat dijadikan bahan dalam pengambilan keputusan dan menjadi bahan pembelajaran serta adanya inovasi	
77	Laporan bulanan	

Jakarta, 29 Oktober 2021 Disusun oleh Pengendali Teknis,

Tiarma Rosa Sinaga

NIP. 19700521 200501 2 001